

PEDOMAN PENULISAN TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM



MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM 2017



TIM PENYUSUN REVISI
BUKU PEDOMAN PENULISAN TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

PENGARAH

Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum.

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Azhari, S.H., MCL, M.A.

KETUA

Dr. Mohd. Din, S.H., M.H.

WAKIL KETUA

Dr. Mujibussalim, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

Dr. Darmawan, S.H., M.Hum.

ANGGOTA

Dr. Muazzin, S.H., M.H.

Lisa Elfira

Muhammad Ikhsan

Agamna Rahmat

Dharra Indrita Sabrina

Agus Suryanto

Khairun Ifham

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah SWT, yang dengan izin-Nya buku Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis ini selesai, shalawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kehadirat Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis disusun dengan maksud untuk adanya keseragaman dalam “ PENULISAN PROPOSAL dan TESIS “ pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Dengan adanya buku panduan ini sekurang-kurangnya telah ada pedoman umum baik bagi mahasiswa maupun bagi pembimbing sehingga dalam keberagaman bentuk penulisan proposal dan tesis setidaknya dapat diperkecil. Walaupun tidak menutup kemungkinan bagi pembimbing untuk mengarahkan mahasiswa dengan melengkapi kekurangan dari buku panduan ini.

Pada kesempatan ini ijinlah kami menyampaikan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mengoreksi dan memberikan saran-saran sehingga Buku Panduan Penulisan Proposal dan tesis ini dapat diterbitkan. Namun kami tetap menerima saran-saran untuk penyempurnaan tulisan ini. Atas segala bantuan dan saran yang diberikan kami serahkan kepada Allah SWT untuk membalasnya. Amin.

Darussalam, Oktober 2017
Koordinator Prodi Magister Ilmu Hukum,

Dr. Mohd. Din, S.H., M.H.
NIP. 196412311990021006

DAFTAR ISI

	Halaman
TIM REDAKSI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
A. PENDAHULUAN	1
B. PROSEDUR ADMINISTRASI DAN AKADEMIK	2
C. TESIS	3
Halaman Sampul Depan	3
Halaman Sampul Dalam	3
Halaman Pengesahan	4
Abstrak.....	4
Kata Pengantar.....	4
Daftar Tabel	5
Daftar Singkatan	5
Daftar Isi	5
BAB I. PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang Masalah	6
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Kerangka Pikir	8
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sumber dan Teknik Pengumpulan	10
3. Analisa Data	12
G. Keaslian Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	12

BAB II. TINJAUAN TEORITIS (diberi judul)	13
BAB III. OBYEK PENELITIAN (diberi judul)	13
BAB IV. ANALISIS (diberi judul)	13
BAB V. PENUTUP	13
DAFTAR PUSTAKA	14
LAMPIRAN	17
D. TATA CARA PENULISAN	17

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Contoh Halaman Judul luar sampul Usulan Penelitian	27
Lampiran 2. Contoh Halaman Judul sampul dalam Usulan Penelitian	28
Lampiran 3. Contoh Halaman Pengesahan Usulan Penelitian	29
Lampiran 4. Contoh Halaman Abstrak	30
Lampiran 5. Contoh Penulisan Sumber Pustaka	34
Lampiran 6. Contoh Halaman Sampul Depan Tesis	36
Lampiran 7. Contoh Halaman Sampul Dalam Tesis	37
Lampiran 8. Contoh Halaman Pengesahan Komisi Pembimbing	38
Lampiran 9. Contoh Halaman Pengesahan Komisi Penguji	39
Lampiran 10. Contoh Halaman Pernyataan	40
Lampiran 11. Contoh Penulisan Daftar Tabel	41
Lampiran 12. Contoh Daftar Isi Usulan Penelitian Tesis	42
Lampiran 13. Contoh Daftar Isi Tesis	43
Lampiran 14. Contoh penulisan Daftar Pustaka	44
Lampiran 15. Contoh Halaman Samping Sampul Tesis	47

A. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, diterangkan bahwa Program Pascasarjana adalah merupakan hasil satu lembaga Universitas yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, dalam bentuk pendidikan Program Magister dan Program Doktor.

Tujuan pendidikan Program Magister diarahkan untuk mendidik ilmuwan yang mampu meningkatkan skala peranannya dalam keilmuan dan pembangunan. Dengan demikian, mereka yang menempuh jenjang pendidikan program Magister dituntut untuk dapat meningkatkan kemampuan keilmuan melalui jalur penelitian dan pengembangan. Penelitian yang dilakukan untuk menyusun tesis merupakan kegiatan akademik ilmiah yang menggunakan penalaran empirik atau non-empirik dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan, dilaksanakan berdasarkan usulan penelitian yang disetujui oleh Komisi Pembimbing dan panitia usulan penelitian.

Tesis sebagai karya akademik hasil penelitian mendalam yang dilakukan oleh mahasiswa program Magister secara mandiri dan berisi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan karya ilmiah yang:

1. Disusun menurut format tesis yang ditetapkan.
2. Menunjukkan kesahihan metodologi penelitian, ketajaman penalaran dan kedalaman penguasaan teori;
3. Menunjukkan hubungan keterkaitan pemikiran serta kecermatan perumusan masalah batasan penelitian dan kesimpulan.

Dalam melakukan suatu penelitian tesis, selain “meneliti” perkembangan ilmu dan teknologi, juga harus dilakukan dengan “teliti” serta mengikuti tata cara tertentu.

Untuk keseragaman, maka dianggap perlu adanya suatu Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Tesis dan Tesis di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsyiah. Pedoman umum ini terdiri dari Pendahuluan, Usulan Penelitian Tesis, Tesis, Tatacara Penulisan dan Lampiran yang berisi contoh-contoh agar mudah diikuti mahasiswa.

Tesis sebagai karya ilmiah, isi dan cara penulisannya masih dapat bervariasi. Namun diharapkan agar adanya penilaian yang sama dari setiap penguji tentang format penulisan supaya tetap berpedoman pada asas penulisan karya ilmiah dan Pedoman Umum ini.

B. PROSEDUR ADMINISTRASI DAN AKADEMIK

Sebelum melakukan langkah penelitian, mahasiswa harus memenuhi prosedur administrasi dan akademik sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan administrasi keuangan dan administrasi akademik.
2. Mengusulkan tema/topik (judul) yang akan dibahas kepada Koordinator Prodi untuk mendapat pengarahan, (yang kemudian akan ditetapkan siapa yang akan menjadi Pembimbing Tesis) kemudian setelah diperbaiki disampaikan kepada Koordinator Prodi untuk ditetapkan siapa yang akan menjadi Ketua dan Anggota Pembimbing Tesis.
3. Membuat usulan penelitian tesis berdasarkan arahan Ketua dan Anggota Pembimbing.
4. Mendaftarkan usulan penelitian tesis ke sekretariat prodi untuk selanjutnya akan ditetapkan tanggal ujian proposal tesis dan Tim Penguji untuk setiap Usulan Penelitian yang masuk.

5. Melaksanakan penelitian dan penyusunan Tesis, apabila usulan penelitian tesis telah dikoreksi dan disetujui oleh Tim Penguji.
6. Diharuskan memperbaiki atau mengubah Usulan Penelitian untuk diajukan kembali kepada Tim Penguji, apabila Usulan Penelitian tesis ditolak.

C. TESIS

Tesis merupakan karya tulis ilmiah berupa uraian (penelitian) yang membahas permasalahan tertentu dalam ilmu hukum dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum, dengan tujuan mencari pemecahan masalahnya. Tesis lazimnya cukup hanya dengan mengkaji *Middle Theory* dan *Applied Theory*. Tesis diajukan oleh mahasiswa yang bertujuan memperdalam atau mengembangkan teori, hasilnya biasanya merupakan pendalaman atau peneguhan teori yang telah ada sebelumnya. Tema yang diajukan oleh mahasiswa dapat disetujui apabila dianggap layak, baik secara substansi maupun metodologi.

HALAMAN SAMPUL DEPAN

Halaman ini memuat berturut-turut: Judul, nama dan nomor mahasiswa / peserta Program Magister, Lambang Universitas Syiah Kuala, kata-kata Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dan tahun usulan penelitian / tesis diujikan. Halaman ini dicetak diatas kertas dengan bahan *buffalo* atau *linen* dan berwarna merah hati. Contoh halaman sampul depan terdapat pada lampiran 1 (Usulan Penelitian) dan Lampiran 6 (Tesis).

HALAMAN SAMPUL DALAM

Halaman ini sama dengan halaman sampul depan, tetapi di atas kertas putih sesuai dengan ketentuan. Contoh halaman sampul dalam terdapat pada lampiran 2 (Usulan Penelitian) dan Lampiran 7 (Tesis).

HALAMAN PENGESAHAN

Dalam usulan penelitian halaman ini berisi persetujuan Komisi Pembimbing yang terdiri dari ketua dan anggota-anggotanya, lengkap dengan tanda tangan dan tanggal persetujuan. Pada tesis halaman persetujuan ini memuat nama lengkap dan tanda tangan para pembimbing (Komisi Pembimbing). Contoh halaman persetujuan ini terdapat pada lampiran 3 (Usulan Penelitian) dan Lampiran 9 (Tesis).

ABSTRAK

Abstrak adalah deskripsi singkat atau kondensasi suatu karangan yang lazimnya terdiri dari 5 (lima) alinea, di mana masing-masing alinea memuat:

1. Inti masalah.
2. Tujuan yang hendak dicapai.
3. Metode penelitian yang dipergunakan.
4. Hasil penelitian.
5. Saran sebagai solusi yang ditawarkan.

Oleh karena itu, setiap karya ilmiah dalam bentuk tesis pada program studi magister yang ada di Indonesia lazimnya abstrak dikemukakan dalam dua versi bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang mengikuti draf abstrak Bahasa Indonesia. Contoh abstrak terdapat pada lampiran 4.

KATA PENGANTAR

Dalam kata pengantar memuat uraian singkat tentang maksud tesis, penjelasan-penjelasan dan ucapan terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang dianggap berperan/berkontribusi dalam penulisan tesis, Pembimbing, Prodi, Dekan Fakultas Hukum, Rektor, Teman, Keluarga dan lain-lain.

DAFTAR TABEL

Daftar tabel merupakan daftar yang berisi sejumlah tabel yang telah dipapar di dalam tesis dan ditulis dengan huruf kapital secara berurutan sesuai dengan halaman serta nomor tabel-tabel yang telah dikemukakan.

DAFTAR SINGKATAN

Daftar singkatan adalah daftar memuat singkatan-singkatan yang telah dipergunakan dalam penulisan tesis, daftar singkatan ini ditulis dengan huruf kapital secara berurutan sesuai dengan abjad yang dimulai dengan huruf A dan seterusnya.

DAFTAR ISI

Daftar isi untuk Usulan Penelitian Tesis dan Penulisan Tesis agak sedikit berbeda, perbedaan tersebut disebabkan bahwa substansi Tesis lebih luas dari substansi Usulan Penelitian Tesis. Daftar isi Usulan Penelitian Tesis secara teratur dan menurut nomor halamannya memuat daftar tabel, daftar gambar (jika ada) dan judul dari bagian yang merupakan substansi dari usul penelitian serta daftar pustaka. Dalam daftar isi Tesis secara teratur dan menurut nomor halamannya memuat halaman pengesahan, Abstrak (Indonesia dan Inggris) , kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan (ketiga daftar tersebut jika ada) dan judul dari setiap bab dan sub bab yang merupakan substansi dari penulisan Tesis serta daftar pustaka, dan dimuat pula lampiran (jika ada).

Daftar isi diketik dengan huruf besar tanpa diakhiri titik dan ditempatkan di tengah-tengah kertas dua spasi di bawah nomor halaman. Perkataan “Halaman” diketik di pinggir kanan, dua spasi di bawah daftar isi dan tiga sentimeter dari sisi kanan. Susunan daftar isi menyusul dua spasi di bawahnya. Bila daftar isi memerlukan lebih dari satu halaman maka diteruskan pada halaman berikutnya. Pembagian atau penyusunan substansi usul penelitian berdasarkan huruf kapital dimulai dari A dan seterusnya tergantung dari daftar isi. Judul setiap bagian diketik semuanya diketik

dengan huruf besar. Demikian pula untuk Tesis setiap judul bab ditulis dengan huruf kapital sedangkan untuk sub bab tidak. Daftar isi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang usul penelitian/tesis dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat substansi dari penelitian. Contoh halaman daftar isi terdapat pada lampiran 13 (Usulan Penelitian dan Tesis)

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang adalah bagian yang memuat dasar dan alasan serta argumentasi pentingnya dilakukan penelitian yang dimaksudkan. Pada bagian ini masalah penelitian atau keadaan yang akan diteliti dijabarkan dengan jelas disertai keterangan bahwa masalah tersebut memang belum terjawab. Diuraikan juga proses dalam mengidentifikasi masalah penelitian tersebut. Latar belakang dalam tesis hampir sama dengan yang terdapat dalam usulan penelitian dan mungkin sudah lebih diperluas. Sebab itu pada bagian latar belakang tesis ini juga ada perumusan masalah. Dengan kata lain latar belakang permasalahan pada tesis ini berisi uraian tentang apa yang menjadi masalah penting dan perlu diteliti. Masalah tersebut harus didukung oleh fakta empiris sehingga jelas, memang ada masalah yang perlu diteliti. Juga harus ditunjukkan letak masalah itu dalam pemecahan permasalahan yang lebih luas. Untuk patokan utama dalam mencari/menentukan masalah haruslah berpedoman kepada adanya pertentangan antara *das sollen* (keharusan) dan *das sein* (kenyataan).

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang dicoba untuk ditemukan jawabannya.¹ Masalah dapat

¹ Lihat Fred. N. Kerlinger, *Foundation of Behavioural Research*, FBS Publishers, hlm. 15-17.

juga diartikan sebagai penyimpangan (*deviation*) atau kesenjangan (*gap*) antara:

1. apa yang seharusnya (*das sollen*) dan apa yang pada kenyataannya terjadi (*das sein*);
2. antara rencana dan pelaksanaan;
3. antara harapan dan kenyataan;
4. antara cita-cita dan apa yang dicapai; dan
5. antara tujuan dan pencapaian.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masalah, *adalah penyimpangan dari keharusan rencana, harapan, cita-cita atau tujuan, sehingga menimbulkan pelbagai pertanyaan yang perlu mendapat jawaban*, jawaban atas pertanyaan tersebut diharapkan dapat diperoleh melalui suatu penelitian.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam bagian ini disebutkan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini menunjukkan dengan tegas apa yang hendak dijawab atau dapat diperoleh dari penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus berkorelasi dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan. Untuk lebih jelas persoalan tersebut dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut:

Misalnya:

Identifikasi masalah merumuskan “*apakah kendala yang muncul dalam pembinaan narapidana di Lembaga Permusyawaratan?*”.

Tujuan penelitian hendaknya “*mencari alternatif pemecahan masalah dalam melakukan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*”.

Tujuan penelitian harus jelas dan tegas, yang dapat dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan tujuan penelitian secara keseluruhan yang ingin dicapai melalui penelitian. Selanjutnya tujuan khusus merupakan penjabaran atau

pentahapan dari tujuan umum, yang bersifat lebih operasional. Bila semua tujuan khusus tercapai, maka tujuan umum penelitian juga akan terpenuhi.

Kegunaan penelitian mencakup baik kegunaan teoretis maupun praktis. Kegunaan teoretis berkaitan dengan pengembangan keilmuan (teori), dan harapan-harapan yang hendak dicapai, sedangkan kegunaan praktis berkorelasi dengan kemampuan aplikasi teoritis mahasiswa dalam kenyataannya, atau dengan kebijakan lembaga tertentu, misalnya bagi Instansi pemerintah, atau swasta.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dikemukakan dengan menunjukkan bahwa masalah yang akan dihadapi belum pernah dipecahkan oleh peneliti terlebih dahulu, atau dinyatakan dengan tegas beda penelitian ini dengan yang sudah pernah dilaksanakan

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan konstruksi pemikiran (*logical construct*) yang dibangun sebagai susunan pola pikir yang sistematis, yang berdasarkan pada konsep-konsep penelitian atau berdasarkan teori-teori yang akan digunakan untuk menjawab atau memecahkan permasalahan yang diteliti. Dalam kerangka pikir ini dimuat teori-teori yang akan dijadikan landasan pijak untuk menganalisis permasalahan yang diajukan. Jika konstruksi pemikiran itu tidak dibangun berdasarkan teori maka dapat disusun berdasarkan konsep-konsep atau asas-asas hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang

sistematis.¹ Dalam uraian ini dimuat dengan jelas metode penelitian yang digunakan peneliti. Penggunaan metode berimplikasi kepada teknik pengumpulan data dan analisis serta kesimpulan penelitian. Lazimnya pada bagian ini minimal memuat sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Secara jelas diuraikan jenis penelitiannya dan metode pendekatan apa yang digunakan dalam penelitian. Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap ilmu hukum di antaranya :

- a. *Pendekatan yuridis-normatif*, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Pendekatan yuridis normatif dikenal pula dengan istilah pendekatan/penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. *Tahap penelitian Yuridis Normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur). Namun sepanjang diperlukan, dapat dilakukan interview untuk melangkapi studi kepustakaan.* Termasuk ke dalam kajian/pendekatan Yuridis Normatif di antaranya adalah sejarah hukum dan perbandingan hukum, juga filsafat hukum.
- b. *Pendekatan yuridis-empiris*, yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Pendekatan ini dikenal dengan penelitian hukum yang empirik atau penelitian hukum sosiologis.² Termasuk ke dalam pendekatan yang dapat dikategorikan pendekatan empirik antara lain misalnya, pendekatan *Kriminologis, yuridis-antropologis,*

¹ Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan bahwa penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metodologi penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena itu ilmu hukum dapat dibedakan/berbeda dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Lihat Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindi Persada, Jakarta, 1995, hlm. 2.

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34 dst.

yuridis-psikologis, yuridis-ekonomis dan lain-lain. Pendekatan empirik terkadang juga dapat bersifat *inter* dan *multi disipliner*.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data adalah data yang dikumpulkan dapat berupa data primer dan data sekunder. Namun juga data sekunder tergantung pada jenis penelitian oleh sumber data yang di dapat berupa penelitian di lapangan.

Teknik pengumpulan data merupakan penerapan dari metode untuk dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki. Sementara teknik juga berhubungan erat dengan alat sebagai sarana yang dipergunakan. Oleh karena itu, teknik dan alat pengumpulan data yang dilakukan bergantung pada pendekatan yang dilaksanakan oleh peneliti.

Untuk *pendekatan yuridis-normatif*, teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi dan indeks komulatif dan lain-lain. Pada dasarnya teknik pengumpulan data dengan pendekatan ini dilakukan terhadap literatur tertulis (kepuustakaan). Teknik ini dapat dilakukan melalui pengklasifikasian dan pencatatan yang rinci (dianggap lengkap), sistematis dan terarah mengenai dokumen/kepuustakaan. Kemudian **Interpretasi** (*Gramatikal, Otentik, dan Sistematis*) dan **Konstruksi Hukum** (*Analogi dan Argumentum Acontrario*) bisa dilakukan.

Untuk pendekatan *yuridis-empirik* (Sosiologis, ekonomis, Anthropologis dan lainnya) teknik pengumpulan data dilakukan terhadap data dan bahan non hukum. Data tersebut dapat berupa data hasil penelitian (langsung) dari lapangan atau data hasil penelitian pihak lain yang berkaitan dan sudah teruji secara ilmiah.

Teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan khususnya guna memperoleh data lapangan (non Hukum) di antaranya melalui

metode tes, observasi, kuesioner, interview dan dokumentasi, sedangkan alat untuk pengumpulan data dapat dirinci sebagai berikut:

1. Untuk *Metode tes*, digunakan sebagai jenis test, baik yang standar (sudah ada) ataupun tes buatan (oleh peneliti).
2. Untuk *Observasi*, digunakan catatan lapangan (catatan berkala), *Anecdotal Record* (daftar riwayat), *Check List*, *Rating Scale*, *Mechanical Devices*, atau *Studi Kasus* terhadap fenomena yang dapat ditangkap.
3. Untuk *Interview*, digunakan *Directive Interview* atau pedoman wawancara terstruktur, *Non Directive Interview*, atau pedoman wawancara bebas. Penggunaan tape recorder sangat diperlukan dalam teknik pengumpulan data ini.
4. Untuk metode koesioner digunakan berbagai bentuk kuesioner, misalnya **kuesioner tipe isian** (*Open and Closed from Item*) dan **kuesioner tipe pilihan** (*Forced and Multiple Choice*).

Bagi penelitian yang menggunakan pendekatan *yuridis-empirik*, perlu dilakukan penentuan sampel. Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Hal ini dilakukan karena banyak alasan, baik dari segi ekonomis, maupun keakuratannya. Penentuan sampel tidak akan mengurangi nilai ilmiah suatu penelitian. Terdapat beberapa teknik penentuan sampel yaitu:

- a. **Teknik Random Sampling**; dengan cara undian atau *lotere*, *cara ordinal*, *randomisasi dari tabel bilangan random*, *multistage sampling*.
- b. **Teknik Non-Random Sampling**; *quota sampling*, *accidental sampling*, *purposive sampling*.

3. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.¹ Dari pengertian yang demikian, nampak analisis memiliki kaitannya erat dengan pendekatan masalah.

Lazimnya dalam penelitian hukum normatif, data dianalisis secara *kualitatif* yaitu analisis dengan penguraian *deskriptis analitis* dan *preskriptif*. Dalam melakukan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif ini, penganalisisan bertitik tolak dari analisis *yuridis sistematis*. Di samping dapat pula dikombinasikan dengan *analisis yuridis historis* dan *komparatif*.

Untuk penelitian *yuridis-empirik* di samping dapat dilakukan analisis kualitatif sebagaimana disebutkan di atas juga dapat dilakukan analisis kuantitatif (terhadap data yang bersifat kuantitatif) dengan penyajian tabel, diagram maupun kurva.

G. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dikemukakan dengan menunjukkan bahwa masalah yang akan dihadapi belum pernah dipecahkan oleh peneliti terlebih dahulu, atau dinyatakan dengan tegas beda penelitian ini dengan yang sudah pernah dilaksanakan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan, memuat uraian dan penjelasan secara singkat dan sistematis mengenai keseluruhan uraian tesis, mulai dari bab pertama sampai kepada bab terakhir. Sistematika penulisan berbeda dengan daftar isi.

¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

BAB II. TINJAUAN TEORITIS (diberi judul)

Dalam Tinjauan Pustaka objek bahasan harus diintrodukir ke dalam judul bab. Bagian ini memuat teori-teori atau doktrin, konsep-konsep yang relevan dengan thema Tesis dan permasalahan hukum yang akan diteliti. Teori ini memiliki keterkaitan dengan kerangka pikir namun bukan kerangka pikir. Teori-teori harus bersumber dari buku teks, jurnal, atau seri penerbitan sains lainnya, termasuk ke dalamnya hasil-hasil penelitian. Uraian teori-teori harus memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III. OBYEK PENELITIAN (diberi judul)

Pada bab ini memuat Gambaran mengenai Objek Penelitian. Dalam bab ini juga dapat disajikan mengenai kasus-kasus yang dianalisis atau menjadi bahan analisis. Obyek penelitian diuraikan secara deskriptif.

BAB IV. ANALISIS (diberi judul)

Bagian ini merupakan inti Tesis, memuat seluruh permasalahan (hukum) yang telah diidentifikasi, kemudian dianalisis satu persatu secara tuntas dan sistematis, dan memiliki keterkaitan dengan tinjauan pustaka. Oleh karena itu sebaiknya uraian ini terbagi dalam beberapa sub-bab sesuai dengan identifikasi masalah pada Bab I (satu). Pada bagian analisis juga harus konsisten dengan kerangka pemikiran yang dijadikan landasan berpijak serta konsisten dengan metode penelitian yang digunakan.

BAB V. PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban peneliti terhadap permasalahan hukum yang diidentifikasi (identifikasi masalah). Kesimpulan harus menunjukkan benang merah antara identifikasi masalah dengan analisis pembahasan. Saran, merupakan uraian yang dikemukakan peneliti terhadap berbagai persoalan yang tidak dijawab oleh kesimpulan, saran dapat merupakan usulan atau tanggapan (komentar) terhadap persoalan untuk dicarikan jalan keluarnya, oleh karena itu saran

bersifat lebih prediktif (mengarah kepada perbaikan di masa yang akan datang).

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka adalah sumber bacaan suatu karya tulis ilmiah, yang biasanya dicantumkan pada akhir suatu karya ilmiah. Kadar ilmiah suatu karya tulis sangat tergantung pada wawasan si penulisnya. Luasnya wawasan si penulis diwarnai oleh luas dan terpilihnya bahan bacaan yang dipergunakannya. Sumber bacaan (reference) suatu karya tulis sangatlah luas dan beragam, dapat berupa buku, jurnal, atau periodikal, ensiklopedi, majalah, buletin, makalah, skripsi, surat kabar, bank data, mikrofilm, bahkan komunikasi pribadi (*personal communication*) melalui telepon, komputer, dan sebagainya.

Daftar pustaka disusun sedemikian rupa sehingga pembaca yang berminat dapat dengan mudah memperoleh kepustakaan yang menjadi perhatiannya tanpa terjadi suatu kekeliruan. Oleh karena itu dalam menuliskan suatu daftar pustaka haruslah lengkap unsur kepustakaan, yaitu: nama pengarang, judul karangan, nama penerbit, kota tempat penerbitan, dan tahun penerbitan, sebagai berikut:

a. Nama Pengarang

Nama pengarang dalam suatu daftar pustaka disusun menurut abjad dimulai dengan huruf A dan seterusnya. Bila pengarang satu orang (tunggal) atau dua orang, nama ditulis secara lengkap, lalu diberi tanda koma. Singkatan nama tidak dipakai untuk memulai penulisan, contohnya "M. Amin" atau "Mohd. Daud" harus ditulis "Amin, M. atau Daud, Mohd.". Nama pengarang Indonesia (yang ditulis lengkap) tidak dibalik penulisannya. Tetapi nama pengarang asing (meskipun ditulis lengkap) penulisannya tetap dibalik.. Jika pengarangnya lebih dari 2 (dua) orang maka penyebutannya hanya satu saja, yakni nama pada urutan pertama secara lengkap ditambah dengan kata "et.al.". Adakalanya sumber informasi bersifat institusional seperti: laporan

tahunan dari FAO, WHO, Depdikbud, dan sebagainya, maka dalam hal ini nama-nama institusi tersebut ditulis sebagai pengganti nama pengarang, tetapi ditempatkan posisinya setelah semua nama-nama pengarang dan sesuai dengan abjadnya.

b. Judul Karangan (artikel atau judul buku)

Judul buku boleh diberi bergaris di bawahnya dan boleh juga tidak asal konsisten, sedangkan judul artikel, makalah, skripsi dan lain-lain tidak diberi bergaris. Apabila sebuah buku dicetak (edisi) lebih dari satu kali, ditulis juga cetakan (edisi) keberapa. Sebuah artikel yang terdapat dalam buku yang diedit oleh editor disebutkan juga nama atau nama-nama editornya. Demikian juga buku yang terdiri dari beberapa jilid atau volume, maka jilid dan volume juga dituliskan.

c. Nama Penerbit Buku

Bila artikel diperoleh dari jurnal, periodikal, surat kabar, atau majalah, maka cukup hanya menuliskan sumber-sumber artikel itu saja tanpa menuliskan nama penerbitnya. Namun jurnal atau majalah tersebut boleh diberi bergaris di bawahnya dan boleh juga tidak, asal konsisten. Penyingkatan nama-nama jurnal, periodik, ataupun majalah yang bertaraf internasional. Untuk jurnal, periodikal, dan makalah disertakan volume atau nomornya serta nomor halaman pemuatan artikel tersebut. Untuk surat kabar, ditulis tanggal penerbitan dan nomor halaman pemuatan. Untuk kepustakaan yang tidak dipublikasikan seperti makalah, skripsi, tesis, dan sejenisnya dipergunakan nama instansi atau badan yang mendokumentasinya sebagai pengganti nama penerbit.

d. Nama Kota Tempat Penerbitan

Nama kota tempat suatu sumber bacaan diterbitkan, ditempatkan setelah nama penerbit.

e. Tahun Penerbitan

Tahun penerbitan suatu sumber bacaan ditempatkan setelah nama kota tempat penerbitan.

f. Nomor Halaman

Nomor halaman sumber bacaan ada yang perlu dan ada yang tidak perlu dicantumkan dalam daftar kepustakaan. Untuk buku-buku tidak perlu dituliskan halamannya, tetapi untuk artikel dalam sebuah buku yang diedit oleh editor, perlu dituliskan halaman di mana artikel tersebut terdapat. Untuk jurnal periodikal, buletin, majalah, dan surat kabar perlu ditulis nomor halaman, sedangkan majalah, skripsi, tesis, disertasi dan sejenisnya tidak perlu ditulis nomor halaman.

Pengetikan Daftar Kepustakaan

Daftar kepustakaan ditempatkan setelah lembar akhir dari bab bagian penutup. Judul DAFTAR PUSTAKA ditulis dengan huruf kapital, tanpa digaris dan ditempatkan di tengah-tengah bagian atas.

- a. Daftar kepustakaan disusun menurut abjad nama pengarang pertama. Nama-nama disini adalah nama keluarga atau nama akhir.
 - b. Jarak antara judul dengan baris pertama adalah empat spasi.
 - c. Pengetikan setiap nama pertama pengarang dalam suatu daftar pustaka dimulai dari pias kiri. Apabila satu sumber bacaan perlu ditulis lebih dari sebaris, maka baris-baris berikutnya diketik satu spasi dan dimulai setelah ketukan 8 dari pias kiri.
 - d. Setiap baris akhir suatu bacaan diakhiri dengan tanda titik. Jarak antara suatu baris akhir suatu sumber bacaan dengan baris yang berikutnya diketik dua spasi.
 - e. Tidak dibenarkan mengubah karakter (huruf) latin (greek) seperti, menjadi alfa, beta, dan gamma dari suatu judul sumber bacaan.
 - f. Jumlah buku yang wajib dikutip minimal 30 (tiga puluh) judul
- Contoh penulisan daftar pustaka ini terdapat pada lampiran 14.

LAMPIRAN

Dalam lampiran (kalau ada) terdapat keterangan atau informasi yang diperlukan pada pelaksanaan penelitian, misalnya rencana anggaran biaya, lembar kuesioner yang dipergunakan dalam penelitian, dan sifatnya hanya melengkapi usulan penelitian.

D. TATA CARA PENULISAN

Tata cara penulisan meliputi bahan dan ukuran, pengetikan, penomoran, daftar dan gambar, bahasa, dan penulisan nama.

1. Bahan dan Ukuran

Bahan dan ukuran mencakup naskah, sampul, warna sampul, tulisan pada sampul, dan ukuran.

2. Naskah

Naskah dibuat di atas kertas HVS 80 g/m² dan tidak timbal balik.

3. Sampul

Sampul dibuat dari kertas buffalo atau yang sejenis, dan sedapat-dapatnya diperkuat dengan kuarto dan dilapisi dengan plastik. Tulisan yang tercetak pada sampul sama dengan yang terdapat pada halaman judul.

4. Warna sampul

Warna sampul ditetapkan merah

5. Ukuran

Ukuran naskah ialah : 21 cm x 28 cm. (Ukuran kuarto/A4) warna putih.

6. Pengetikan

Pada pengetikan disajikan jenis huruf, bilangan dan satuan, jarak baris, batas tepi, pengisian ruangan, alinea baru, permulaan kalimat, judul dan sub judul, perincian ke bawah, dan letak simetris.

7. Jenis huruf

- a. Naskah diketik dengan huruf Time New Roman 12, untuk keseluruhan naskah harus dipakai jenis huruf yang sama (penggunaan huruf miring atau persegi, tidak diperkenankan).
- b. Huruf miring digunakan untuk menggantikan tulisan kata (kalimat) yang biasanya digaris bawahi untuk tujuan tertentu, misalnya nama Latin, singkatan asing, dan lain-lain.
- c. Lambang, huruf Junani, atau tanda-tanda yang tidak dapat diketik, harus ditulis dengan rapi memakai tinta hitam.

8. Bilangan dan satuan

- a. Bilangan diketik dengan angka, misalnya 19 gram bahan, kecuali pada permulaan kalimat, harus ditulis dengan huruf.
- b. Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik, misalnya berat emas 50,5 gram.
- c. Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya huruf kecil tanpa titik dibelakangnya misalnya m, g, kg, cal.

9. Jarak baris dan jumlah halaman

Jarak antara 2 baris dibuat 2 spasi, kecuali abstrak, kutipan langsung, judul daftar (tabel) dan gambar yang lebih dari 1 baris, dan daftar pustaka, yang diketik dengan jarak satu spasi ke bawah.

Jumlah halaman tesis minimal 100 halaman termasuk daftar pustaka.

10. Batas tepi

Batas-batas pengetikan, ditinjau dari pinggir kertas, ketentuannya diatur sebagai berikut:

- a. tepi atas : 4 cm
- b. tepi bawah : 3 cm
- c. tepi kiri : 4 cm, dan
- d. tepi kanan : 3 cm

11. Pengisian ruangan

Ruangan yang terdapat pada halaman naskah diisi penuh, artinya pengetikan harus mulai dari batas tepi kiri sampai ke batas tepi kanan, dan jangan sampai ada ruangan yang terbuang, kecuali kalau akan memulai dengan alinea baru, persamaan, daftar, gambar, sub judul, atau hal-hal yang khusus.

12. Alinea baru

Alinea baru dimulai pada ketikan yang ke – 7 dari batas tepi kiri.

13. Permulaan kalimat

Bilangan, lambang, atau rumus kimia yang dimulai suatu kalimat, harus dieja, misalnya, sepuluh ekor tikus.

14. Judul bab, sub bab, anak sub bab dan lain-lain

- a. Judul bab harus ditulis dengan huruf besar (kapital) semua dan diatur selalu simetris, dengan jarak 4 cm dari tepi atas tanpa diakhiri dengan titik.
- b. Sub bab ditulis simetris di tengah-tengah atau dipinggir kiri. Huruf awal dimulai dengan huruf besa (kapital), kecuali kata penghubung dan kata depan, tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah sub bab dimulai dengan alinea baru.
- c. Anak sub bab diketik mulai dari batas tepi kiri, tetapi hanya huruf yang pertama saja yang berupa huruf besar, tanpa diakhiri dengan

titik. Kalimat pertama sesudah anak sub bab dimulai dengan alinea baru.

- d. Sub anak sub bab ditulis mulai dari ketikan ke -6 diikuti dengan titik dan garis bawah. Kalimat pertama yang menyusul kemudian. Kecuali itu sub anak sub bab dapat juga ditulis langsung berupa kalimat, tetapi yang berfungsi sebagai sub anak sub bab ditempatkan paling depan dan diberi garis bawah.

15. Rincian ke bawah

Jika pada penulis naskah ada rincian yang harus ke bawah, pakailah nomor urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat rincian. Penggunaan garis penghubung (-) yang ditempatkan di depan rincian tidaklah dibenarkan

16. Letak simetris

Gambar, tabel (daftar), persamaan, judul, dan sub judul ditulis simetris terhadap tepi kiri dan kanan pengetikan.

17. Penomoran

Bagian ini dibagi menjadi penomoran halaman, tabel (daftar), gambar, dan persamaan.

18. Halaman

- a. Bagian awal laporan, mulai dari halaman judul sampai ke intisari, diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil, diletakkan ditengah bawah.
- b. Bagian utama dan bagian akhir, mulai dari pendahuluan (BAB I) sampai ke halaman terakhir, memakai angka Arab sebagai nomor halaman

- c. Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas kecuali kalau ada judul atau bab pada bagian atas halaman tersebut. Untuk halaman yang demikian nomornya ditulis di sebelah tengah-tengah bawah.
- d. Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas atau tepi bawah.

19. Tabel (daftar)

Tabel (daftar) diberi judul dan nomor urut dengan angka Arab.

20. Bahasa

a. Bahasa yang dipakai

Bahasa yang dipakai ialah bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan kaidah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), yaitu ada subyek dan prediket, dan supaya lebih sempurna, ditambah dengan objek dan keterangan, bahasa yang digunakan sederhana, lugas, objektif.

b. Bentuk kalimat

Kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama dan atau orang kedua (saya, aku, kami, engkau dan lain-lain), tetapi dibuat dalam bentuk pasif. Pada penyajian ucapan terima kasih pada prakata, saya diganti dengan penulis.

c. Istilah

Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau yang sudah di Indonesiakan. Jika terpaksa harus memakai istilah asing, bubuhkan garis bawah atau tulis miring pada istilah itu.

d. Kesalahan yang sering terjadi

Kata penghubung seperti *sehingga*, dan *sedangkan*, tidak boleh dipakai untuk memulai suatu kalimat. Kata depan misalnya *pada*, sering dipakai tidak pada tempatnya, misalnya diletakkan di depan

subyek (merusak susunan kalimat). Kata *dimana* dan *dari* sering kurang tepat pemakainya dan hanya dipakai seperti penggunaan kata “*where*” dan “*of*” dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia bentuk yang demikian tidaklah baku dan jangan dipakai. *Awalan ke* dan *di* harus dibedakan dengan *kata depan ke* dan *di*. Tanda baca harus digunakan dengan tepat.

21. Penulisan Nama

Penulisan nama mencakup nama penulis yang diacu dalam uraian, daftar pustaka. Gelar kesarjanaan tidak boleh dicantumkan.

22. Kutipan

a. Kutipan langsung

Mengutip secara langsung dilakukan dengan cara menyalin kata demi kata yang sama bunyi dan ejaannya.

1. Kutipan pendek, yaitu kutipan yang tidak lebih dari lima baris, maka dapat ditulis langsung pada teks dengan tanda kutip di antara bagian yang dikutip. Contoh : Kepres nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 butir 7 menyebutkan “Perusahaan Kartu (*Credit Card Company*) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit”.
2. Kutipan panjang (lebih dari lima baris), ditulis tanpa tanda kutip, tetapi dimulai di baris baru 5 ketuk (karakter) sejajar ke bawah dengan ketikan hanya satu spasi.

Contoh:

Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 hanya menyebutkan “Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”. Dalam penjelasan Undang-undang tersebut disebutkan bahwa:

“.....Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan..... Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang berkaitan dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan “agunan tambahan”.

Pada contoh di atas terlihat ada tanda titik-titik ini menunjukkan ada beberapa kata yang dibuang, namun tidak mengurangi makna yang dikutip. Tanda titik-titik ini disebut *ellipses point*.

b. Kutipan tidak langsung

Adalah kutipan yang dibuat bila penulis mengutip karangan yang diolah memakai bahasa sendiri (tanpa memasukkan pribadi penulis). Kutipan ini ditulis tanpa menggunakan tanda kutip. Tentang suatu masalah yang sama penulis dapat mengambil dari beberapa sumber, sepanjang isi, maksud dan jiwa yang dikutip sama.

c. Sumber kutipan dan Catatan Kaki (*foot note*)

1. Kutipan pada dasarnya harus sama dengan aslinya
2. Kutipan yang panjangnya 5 baris atau lebih diketik dengan satu jarak satauan baris dengan mengosongkan 4 ketukan dari garis sebelah kiri.
3. Kutipan yang panjangnya kurang dari 5 baris dimasukkan ke dalam teks dengan memberi tanda kutip.
4. Tiap kutipan diberi nomor pada akhir kutipan dan pengetikannya diangkat sedikit diatas garis.
5. Kutipan dalam bahasa asing hendaklah ditulis selengkapya dan di bawahnya diberi terjemahannya.
6. Kutipan atau pendapat yang bersumber pada tulisan orang lain dan digunakan dalam skripsi harus disebutkan sumbernya berupa catatan kaki (*foot note*).

Catatan kaki tidak digunakan sebagai sumber.

Catatan Kaki (*foot note*)

Catatan kaki adalah catatan-catatan pada kaki halaman untuk menyebutkan sumber suatu kutipan, pendapat atau buah pikiran. Catatan kaki juga dapat berisi komentar tentang apa yang dikemukakan dalam teks.

1. Catatan kaki ditulis pada bagian bawah halaman di bawah teks sejajar ketikan dari garis tepi,. Jarak catatan kaki dengan kalimat terakhir dalam teks skripsi adalah 4 satuan jarak baris dengan disela garis pemisah sepanjang 5 cm, dimulai pada garis batas sebelah kiri. Catatan kaki diberi nomor urut sesuai dengan nomor kutipan dan diketik dengan satu satuan jarak baris serta harus ditempatkan pada halaman yang sama dengan kutipannya, dimulai dengan nomor 1 dan seterusnya untuk seluruh tesis.
2. Dalam catatan kaki dicantumkan nama pengarang, judul buku dan edisinya, tempat diterbitkan, nama penerbit, tahun penerbitan dan halaman (mengenai pangkat dan atau gelar pengarang tidak perlu ditulis dalam catatan kaki).
3. Kalau terdapat dua atau tiga pengarang maka nama mereka disebutkan semuanya, sedangkan kalau lebih dari dua orang, hanya nama pengarang pertama saja disebutkan dan dibelakangnya ditulis: et, al dengan orang lain.
4. Singkatan catatan kaki.

Catatan kaki tidak selalu ditulis lengkap. Kalau suatu sumber pernah disebutkan dalam halaman sebelumnya secara lengkap., catatan kaki mengenai sumber tersebut selanjutnya disingkat dengan menggunakan singkatan :

I b i d, (Ibidem-dalam karangan yang sama). Dipakai kalau kutipan dari sumber yang sama disebut pada catatan kaki sebelumnya, tanpa

disela oleh sumber lain, dan disebutkan halamannya. Sumber yang sama halaman sama tetapi di selingi oleh sumber yang lain.

Loc.Cit, (Loco Citato) (pada tempat yang sama yang telah disebut). Digunakan apabila hendak menunjukkan kepada halaman yang dari sumber yang telah disebutkan sebelumnya. Halaman yang sama dari sumber yang sama yang telah diselingi oleh sumber lain.

Op.Cit, (Opere Citato) Suatu yang sama, halaman berbeda telah diselingi oleh sumber atau unsur yang lain dalam karangan yang telah disebut). Digunakan untuk menunjukkan kepada sumber yang telah disebutkan sebelumnya dengan lengkap, tetapi telah diselingi oleh sumber lain dan halaman berbeda.

contoh: Sering orang menyebutkan bahwa “*sociology is the studi of human relation and social ornganisation*”¹⁾

.....
.....

Faktor-faktor inilah yang akan menentukan suasana dan kehidupan dalam kelompok ataupun dengan lebih jelas lagi disebutkan: “*Group effectivancess, then, depends upon the harmonioces intergration of goals, norms, sanctions and action.*”²⁾

.....
.....

Untuk ini maka sosiologi tidak dapat tidak harus juga meneliti pole interaksi serta lebih lanjut lagi bagaimana pola ini mempengaruhi faktor kehidupan kelompok masyarakat.³⁾

.....
.....

Namun Ronald Freeman menyatakan pula bahwa:

¹⁾ Robert, W.O. Brien, *Readings in General Sociology*, B rd, ed. Boston, 1964 hlm. 1.

²⁾ *I b I d*, hlm. 2.

³⁾ Ronald Freeman, *Principles of Sociology*, New York, 1952. hlm. 10.

²⁾ Robert W.O. Brien. *Op.Cit*, hl.3.

“Function refers to what a unit does, what action it performs relative to other units in the same system.”¹⁾

.....

.....

Disamping meneliti tingkah laku individu yang terbuka, hal mana dapat mempengaruhi orang lain atau pun kelompok, maka sosiologi juga meneliti proses yang membimbing, mendorong dan mendidik individu dalam menentukan pengambilan sikapnya.²⁾

³⁾ Ronald Freeman, *Loc Cit*

Lampiran 1. Contoh halaman judul luar sampul Usulan Penelitian (**cetak
Timbul, kode warna nomor 1**)

USULAN PENELITIAN

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN
MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI DI
KOTA BANDA ACEH
(Times New Roman 14)**

Oleh

**NAMA MAHASISWA
1703201010001
(Times New Roman 12)**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
BANDA ACEH
2017
(Times New Roman 14)**

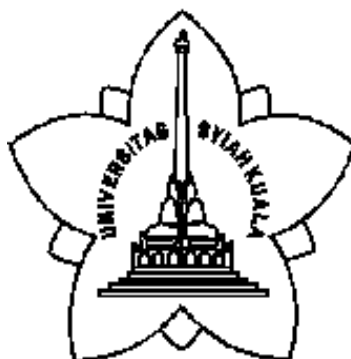
Lampiran 2. Contoh halaman judul sampul dalam Usulan Penelitian

USULAN PENELITIAN

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN
MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI DI
KOTA BANDA ACEH
(Times New Roman 14)**

Oleh

**NAMA MAHASISWA
1703201010001
(Times New Roman 12)**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
BANDA ACEH
2017
(Times New Roman 14)**

Lampiran 3. Contoh halaman pengesahan Usulan Penelitian

LEMBARAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN
MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH
MANDIRI DI KOTA BANDA ACEH

Nama :

NPM :

Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM

Tanggal Ujian :

Menyetujui:

Komisi Penguji

Nama Dosen	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Husni, S.H., M.Hum.	(.....)
2. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.	(.....)
3. Dr. Mohd. Din, S.H., M.H.	(.....)
4. Prof. Dr. Eddy Purnama, S.H., M.Hum.	(.....)
5. Dr. Mujibussalim, S.H., M.Hum.	(.....)

Mengetahui:

Universitas Syiah Kuala
Fakultas Hukum
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Dr. Mohd. Din., S.H., M.H.
NIP. 196412311990021006

Lampiran 4. Contoh penulisan Abstrak

Penulisan Abstrak Bahasa Indonesia

EKSISTENSI OTONOMI KHUSUS PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
BERDASARKAN UUD 1945

Naufal Zuhairy*
Husni Jalil**
Eddy Purnama***

ABSTRAK

Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian “Perkataan khusus” memiliki cakupan yang luas, antara lain karena dimungkinkan membentuk pemerintahan daerah dengan otonomi khusus. Masalah pokok penelitian ialah (1) Apakah Pemberian Otonomi Khusus Kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah bergeser dari Negara Kesatuan menjadi Negara Federal? (2) Bagaimana Dimensi Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945?.

Penelitian dan pengkajian ini bertujuan, menemukan dan mengembangkan teori mengenai pengaturan Otonomi Khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945, menemukan dan mengembangkan konsepsi hubungan yang serasi dalam pelaksanaan otonomi khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, metode sejarah dan metode perbandingan. Dengan sumber data adalah data skunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (penunjang). Data yang diperoleh, baik dari bahan hukum primer, skunder, tersier, serta informasi dari para ahli, maka analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu analisis isi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*. Pemberian Otonomi Khusus Kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terutama menyangkut Kewenangan Mahkamah Syar’iyah secara substansi telah bergeser dari Konsep Negara Kesatuan menjadi Negara Federal, tetapi secara formal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih tetap berada dalam bingkai NKRI. *Kedua*, Dimensi

* *Student*

** *Chairman of Supervising Committee*

*** *Chairman of Supervising Committee*

Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Otonomi Khusus Provinsi NAD dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945, pada prinsipnya sama sebagaimana diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 antara lain (a) Hubungan keuangan pusat daerah, baik Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus bukan terletak pada mempebesar lumbung Pendapatan Asli Daerah, akan tetapi hubungan keuangan tidak mengurangi kemandirian dan kebebasan daerah dan (b) Hubungan pengawasan merupakan salah satu jaminan bagi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama menyangkut perjanjian luar negeri dan pinjaman luar negeri, namun pengawasan tidak boleh menyebabkan kehilangan kemandirian daerah.

Disarankan agar Mahkamah Syar'iyah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan maka pembentukan Mahkamah Syar'iyah, termasuk hukum materiil dan hukum formil yang diatur dengan Qanun (Peraturan daerah) ditinjau kembali karena bertentangan dengan sistem hukum nasional, dan untuk menjaga kemandirian dan kebebasan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka hendaknya diperlukan suatu garis kebijakan yang lebih progresif untuk mengalokasikan lebih banyak subsidi yang bersifat *block grand* daripada sistem subsidi *specific grand*.

Kata Kunci : Otonomi Khusus dan Negara Kesatuan

Penulisan Abstrak Bahasa Inggris

***THE EXISTENCE OF THE SPECIAL AUTONOMY PROVINCE OF
THE NANGGROE ACEH DARUSSALAM IN THE UNITARY STATE
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, BASED ON
THE 1945 CONSTITUTION***

Naufal Zuhairy*

Husni**

Eddy Purnama***

ABSTRACT

This research intends to find out the answer of existence of the Special Autonomy Province of the Nanggroe Aceh in the Unitary State of the Republic of Indonesia. The main problems of these studies are (1) What is the granting of Special Autonomy Province of the Nanggroe Aceh especially concerning the authority of the Syar'iyah Court, has shifted from Unitary State into a Federated States? (2) How is the relation of the Centre and Region in the Special Autonomy Province of the Nanggroe Aceh Darussalam in Unitary State of the Republic of Indonesia, based on the 1945 Constitution?

This research aims to know and explored about special autonomie in Indonesian according to Indonesian in constitution (UUD 1945), to find and develop good relation concept for special autonomie in Indonesian.

This study is analytical descriptive by used the juridical normative approach, covering the comparative and law historical approach, also provided by the empirical juridical approach, non juridical (political) and futuristic. With a secondary data as the data resources, in the form of primary, secondary and tertiary (subsidiary) legal materials. According to form and character of obtained data, the analysis used by juridical qualitative approach.

The result of this study indicate that first, granting of the Special Autonomy Province of the Nanggroe Aceh Darussalam mainly concerning the authority of the Syar'iyah Court, either materially and formally has not shifted from the Unitary State concept to Federated States concept, and the Province of the Nanggroe Aceh Darussalam remains in the Unitary State of the Republic of Indonesia framework. Second, the direct election system of Regional Heads, mainly in consult with the government and the condition of becoming the Regional Heads, still dominant the centralistic and discriminative. Third, the relationship between the Centre and Region in the Special Autonomy Province of the Nanggroe

* Sutudent

** Chairman of Supervising Committee

*** Chairman of Supervising Committee

Aceh Darussalam being arranged, according to Law No. 18 of 2001 to equal principle which arranged in Law No. 22 of 1999, in the Unitary State of the Republic of Indonesia framework based on of the 1945 Constitution. Its equality situation that are (a) the financial relation of Centre and Region, either the general allocation fund or the special allocation fund, does not in increasing the Regional original income, (b) the control relation one of the guarantee for the intactness of the Unitary State of the Republic of Indonesia region, and (c) the systems of the overseas agreement and loan, to the rule of national law system.

Following are the suggestions to be, the formation of Syar'iyah Court, which includes the material law and the formal law must be regulated by the Regional Regulations (Qanun), requires to be reviewed. The direct election system of Regional Heads, is truly democratic so preferably in consult with the government and the conditions for becoming the Regional Heads containing discriminative elements to be reviewed. Law No. 18 of 2001 regarding the Special Autonomy Province of the Nanggroe Aceh Darussalam, mainly concerning to the delegation of the authority outside governmental is required to be reviewed. Independence and freedom of Region in regulating and managing its own household, so a more progressive policy line is, required for allocation more subsidy as grant block than grant specific. In Implementation of the Special Autonomy Province of the Nanggroe Aceh Darussalam, needs an arrangement of preventive control system (besides repressive control), so the governmental of the province earn to minimize the happening of norm conflict between Regional Regulations of the Province and Regional Regulations of District/Town.

Keywords : Special Autonomy and the Unitary

Lampiran 5. Contoh cara penunjukan Sumber pustaka

1. Nama penulis pada bagian permulaan kalimat

“Glastra Van Loon (1959) mengatakan: ” aturan-aturan hukum mengatur hubungan-hubungan pergaulan.”

2. Nama penulis pada bagian tengah kalimat

“Orang sebaiknya jangan terlalu banyak mengolong-golongkan asas-asas hukum, demikian D. Meuwisen (1991) mengadakan pembedaan antara asas hukum materi dan asas hukum formil.”

3. Nama penulis pada bagian akhir kalimat

“karena filsafat hukum sendiri tidak memiliki meta disiplin diatasnya, maka ia sendiri harus meneliti masalah-masalah berkenaan dengan sifat keilmuan dan metodologi fisalat hukum (M. Van Hocke 1982)

4. Penulis 2 orang

“F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek. (1987), menggambarkan perbedaan antar hukum adminitrasi dengan hukum perdata (filfatreeh) maupun hukum pidana (Strafreeh)”

5. Penulisan lebih dari 2 orang

“untuk mengimbangi kedudukan para pihak, karena tergugat adalah pejabat tata usaha Negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata, (Van Galen DKK, 1986).” Atau (Van Galen et ol, 1986)”

6. Mengacu pada lebih dari 2 sumber

- a. Kalau nama penulis masuk dalam uraian, semua sumber disebutkan dan tersusun menurut tahun terbit: “Menurut Davis dan Heywood (1979), Heywood (1976), dan Shukla dan Misra (1979), studi mengenai kekerabatan merupakan studi sistematis

- b. Jika penulis tidak masuk dalam uraian, maka antara sumber-sumber itu dipasang tanda titik koma: hubungan demikian merupakan hubungan langsung (*on meddelijk*) dan hubungan hidup antara hakim dan sengketa yang sedang diadili. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh kebenaran materil “Materiel Waarheid (Van Galen, 1974; Maarseveen, 1976; Van Wijk, 1979)

7. Pengutipan dari sumber kedua

Pengutipan dari sumber kedua harus menyebutkan nama penulis aslinya dan nama penulis yang buku atau majalahnya dibaca : “Hasil yang sama ditunjukkan pula oleh Vasil dan Hildebrandt (Stevess, 1972)”. Dalam hal ini yang terdapat dalam daftar pustaka hanyalah tulisan Stevenss (1972). Sedapat-dapatnya yang dibaca adalah sumber aslinya.

Lampiran 6. Contoh halaman Sampul Depan Tesis (Cetak Lux, warna Merah Omega 37)

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN
MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI
DI KOTA BANDA ACEH
(Times New Roman 14)**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
MAGISTER HUKUM
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(Times New Roman 12)**

Oleh

**(Times New Roman 12)
NAMA MAHASISWA
1703201010001**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
BANDA ACEH
2017**

(Times New Roman 14)

Lampiran 7. Contoh halaman sampul dalam tesis (cetak tinta mas)

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN
MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI
DI KOTA BANDA ACEH
(Times New Roman 14)**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
MAGISTER HUKUM
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(Times New Roman 12)**

Oleh

**(Times New Roman 12)
NAMA MAHASISWA
1703201010001**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
BANDA ACEH
2017
(Times New Roman 14)**

Lampiran 8. Contoh Halaman Perngesahan (Times New Roman 14)

Judul Tesis : SINKRONISASI PEMBAGIAN DANA
BAGI HASIL MINYAK DAN GAS
BUMI DAN DANA OTONOMI
KHUSUS DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
ACEH DAN KABUPATEN ACEH
UTARA (Times New Roman 14)

Nama :

NPM :

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyetujui:
Komisi Pembimbing,

Prof. Dr. Husni, S.H., M.Hum.
Ketua

Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
Anggota

Mengetahui:

Koordinator Program Studi
Magister Ilmu Hukum,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Syiah Kuala,

Dr. Mohd. Din., S.H. M.H.
NIP. 196412311990021006

Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum.
NIP. 196506281990031001

Lampiran 9. Contoh halaman Pengesahan Komisi Penguji

**SINKRONISASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL
MINYAK DAN GAS BUMI DAN DANA OTONOMI
KHUSUS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
ACEH DAN KABUPATEN ACEH UTARA**

OLEH

Nama Mahasiswa :
NPM :
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Sidang Penguji,
Pada tanggal 02 Januari 2017
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Komisi Penguji

Nama Dosen	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Husni, S.H., M.Hum.	(.....)
2. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.	(.....)
3. Dr. Mohd. Din, S.H., M.H.	(.....)
4. Prof. Dr. Eddy Purnama, S.H., M.Hum.	(.....)
5. Dr. Mujibussalim, S.H., M.Hum.	(.....)

Banda Aceh, 9 Januari 2017

Universitas Syiah Kuala
Fakultas Hukum
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Mohd. Din, S.H., M.H.
NIP. 196412311990021006

Lampiran 10. Contoh Halaman Pernyataan

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NPM :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik magister di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Tesis saya tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang dikutip dari karya orang lain tanpa disebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan.
3. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing;
4. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Darussalam,

Yang membuat pernyataan,

Bermaterai 6000

(NAMA MAHASISWA)
1703201010001

Lampiran 11. Contoh penulisan Daftar Tabel

		Halaman
TABEL	1. LUAS KOTA BANDA ACEH DI PERINCI PER KECAMATAN TAHUN 2002	1
TABEL	2. JUMLAH PENDUDUK KOTA BANDA ACEH DI PERINCI PER KECAMATAN HINGGA BULAN FEBRUARI 2004	2
TABEL	3. MATA PENCARIAN PENDUDUK KOTA BANDA ACEH.....	3
TABEL	4. JUMLAH PESERTA TAFAKUL ASURANSI DI SYAR'AH BANDA ACEH TAHUN 1996-2001.....	4
TABEL	5. JUMLAH KLAIM TAKAFUL ASURANSI SYAR'AH PERIODE TAHUN 1998-2001.....	5
TABEL	6. JUMLAH PESERTA ASURANSI PADA AJB BUMI PUTARA BANDA ACEH PERIODE 1997- 2001.....	6
TABEL	7. KARAKTERISTIK RESPONDEN	7
TABEL	8. PENDAPATAN RESPONDEN TERHADAP KEUNTUNGAN YANG DIJANJIKAN	8
TABEL	9. TANGGAPAN KELUARGA TERHDAP ASURANSI YANG DIPILIH.....	9
TABEL	10. HAL YANG MENDORONG RESPONDEN MENJADI PESERTA ASURANSI	10

Lampiran 12. Daftar Isi Usulan Penelitian Tesis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	
D. KEASLIAN PENELITIAN	
E. KERANGKA PIKIR	
F. METODE PENELITIAN	
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	
2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	
3. Analisis Data	
G. SISTEMATIKA PENULISAN	
H. DAFTAR PUSTAKA (rujukan)	100

Masing-masing item di atas (A s/d H) akan dijelaskan pada bagian uraian

Lampiran 13. Contoh Daftar Isi Tesis

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR TABEL (jika ada)	
DAFTAR GAMBAR (jika ada)	
DAFTAR SINGKATAN (jika ada)	
DAFTAR ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
B. Identifikasi Masalah	
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	
D. Kerangka Pikir	
E. Metode Penelitian	
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	
2. Teknik Pengumpulan Data	
3. Analisis Data	
F. Keaslian Penelitian	
G. Sistematika Penulisan	
BAB II. TINJAUAN TEORITIS (diberi judul)	
A.	
B.	
C. dan seterusnya	

BAB III. OBJEK KAJIAN PENELITIAN (Beri Judul).....	
A.	
B.	
C. dan seterusnya	
BAB IV. ANALISIS DATA/PEMBAHASAN (diberi judul).....	
A.	
B.	
C. dan seterusnya sesuai dengan rumusan masalah	
BAB V. P E N U T U P.....	
A. Kesimpulan.....	
B. Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN (jika ada)	

Lampiran 14. Contoh penulisan Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

a. Seorang atau dua orang pengarang

Alfian, *Segi-segi Budaya Masyarakat Aceh*, P.P. Endang, Jakarta, 1960.

Anderson, J. *Acheen and The Parts on the North and East Coasts of Sumatera*, London, New York, Exford University Press, 1971.

BPHN, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Jakarta, 1976

b. Pengarang lebih dari dua orang

Ibrahim Muhammad. Et.al. *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Tahun 1977/1978

2. Majalah

Chandra Jaya Wardana. "Women and Konship in Aceh Besar, Northern Sumatera". *Ethnology*, XVI, Januari, 1977

Hasymy, A. "Pendidikan Islam di Aceh Dalam Perjalanan Sejarah". *Sinar Darussalam*, No.: 63, 1969.

Scheneeberger, W. "Contributions to Ethnolgy of Central Northern Borneo, 1979". (Traduit Ch. Pelras). *Archipel*, 22, 981.

3. Kumpulan Karangan

a. Koentjaraningrat. (ed). *Masyarakat Desa di Indonesia Masa ini*. Yayasan Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1964.

b. Roucek, J.s. (ed), *Social Control*. D. Von Nostrand Company, Inc, Toronto New York London, 1950.

- c. Tanpa nama pengarang
Anonimus. *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara*.
Kementrian Penerangan, 1953
- d. Seorang pengarang yang menulis lebih dari sebuah buku atau karangan


Supomo. *Kedudukan Hukum adat di Kemudian Hari*. P.T. Pustaka Rakyat, Jakarta, 1959.

----- . *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbit Universitas Jakarta, 1963.

- e. Karangan yang belum di publikasi

Dhany, M. *Peradilan Menurut Hukum Adat di Aceh*. Pusat Studi Hukum Adat dan Islam, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh, 1982.
(Tidak/belum dipublikasikan).

Lampiran 15. Halaman samping sampul tesis

TAHUN

JUDUL TESIS
:
NAMA NPM